

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan mekanisme demokrasi yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan arah kepemimpinan daerah melalui pemilihan langsung. Pilkada menjadi sarana utama untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah dipimpin oleh figur yang memiliki legitimasi rakyat (Winengan, 2018). Secara umum, Pilkada tidak hanya dipahami sebagai proses elektoral, tetapi sebagai arena kontestasi strategis yang melibatkan gagasan, visi pembangunan, kekuatan sosial, hingga dukungan politik dari partai-partai yang memiliki kepentingan dalam menentukan masa depan pemerintahan daerah. Pada tataran ini Pilkada menggambarkan dinamika politik lokal secara nyata dimana partai-partai berupaya memenangkan kandidat yang mereka anggap paling sesuai untuk membawa agenda pembangunan dan kepentingan konstituen (Noor, 2018).

Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dalam kerangka tersebut, Indonesia menerapkan sistem demokrasi elektoral yang memberi ruang bagi sistem multipartai. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sesuai dengan Pasal 6A UUD 1945, sedangkan anggota DPR, DPD, dan DPRD dipilih melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali yang

tertuang dalam Pasal 22E UUD 1945. Adapun pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada. Dalam mekanisme elektoral di Indonesia hal ini bukan sekadar prosedur politik melainkan instrumen konstitusional untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat.

Koalisi diartikan sebagai kerja sama antara dua atau lebih partai politik untuk mencapai tujuan yang sama, terutama memenangkan pasangan calon dalam Pemilu atau Pilkada (Diniyanto et al., 2023). Dalam praktiknya, koalisi tidak hanya berupa pernyataan dukungan formal tetapi mencakup integrasi kekuatan politik, konsolidasi struktur organisasi, pembagian peran dalam kampanye, serta penyelarasan strategi dalam menggalang dukungan pemilih. Pembentukan koalisi berkaitan dengan ketentuan pencalonan dalam Pilkada, di mana partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi ambang batas perolehan kursi atau suara sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Selain itu, dinamika koalisi kerap dipengaruhi oleh pertimbangan pragmatis, seperti kesesuaian figur calon, kepentingan politik jangka pendek, serta kemampuan kandidat dalam menarik dukungan lintas kelompok masyarakat (Rosanti, 2020).

Kota Pematangsiantar sebagai daerah dengan keragaman sosial dan politik yang tinggi memperlihatkan dinamika Pilkada yang kompetitif. Tidak ada satu partai pun yang benar-benar dominan, sehingga koalisi menjadi instrumen bagi partai politik dalam menentukan pasangan calon yang akan diusung. Komposisi kursi DPRD menunjukkan sebaran yang tidak merata, dengan adanya partai yang hanya meraih satu kursi dan sebagian lainnya memperoleh kursi lebih banyak, yang menggambarkan peta politik yang terfragmentasi serta membuka ruang bagi koalisi

lintas partai dalam pengusungan calon kepala daerah (Tribunnews, 2024). Berikut gambaran komposisi kursi DPRD Kota Pematangsiantar:

**Tabel 1. 1 Komposisi Kursi DPRD Kota Pematangsiantar
Periode 2024-2029**

No	Partai Politik	Jumlah Kursi
1	PDI-P	7
2	Gerindra	3
3	NasDem	4
4	Demokrat	3
5	PAN	3
6	PKS	2
7	Hanura	2
8	Golkar	5
9	Perindo	1
Total Kursi		30 Kursi

Sumber: Mistar.id, 2024

Komposisi tersebut menunjukkan kondisi politik lokal yang plural dan tidak terpusat pada satu kekuatan politik tertentu. Fragmentasi kekuatan partai seperti ini membuat koalisi menjadi kebutuhan wajib dalam mengusung calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Tidak ada satu partai pun yang dapat bergerak sendiri tanpa dukungan partai lain karena keterbatasan kursi maupun basis massa (Khodijah & Subekti, 2020).

Pada Pilkada Pematangsiantar 2024, salah satu koalisi politik yang terbentuk dan cukup menarik perhatian publik adalah koalisi pengusung pasangan Wesly Silalahi – Herlina, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai NasDem, dan Partai Gelora. Keempat partai politik ini secara strategis bergabung dan menyatukan kekuatan untuk membentuk blok politik yang cukup signifikan dan diperhitungkan dengan total kekuatan mencapai 10 kursi di DPRD. Koalisi ini menunjukkan adanya konsolidasi dukungan yang solid dalam upaya memenangkan kontestasi politik. Berikut tabel koalisi partai pada Pilkada tersebut:

Tabel 1. 2 Koalisi Partai Pengusung Calon Kepala Daerah Kota Pematangsiantar

No.	Pasangan Calon	Koalisi Partai	Jumlah Kursi	Persentase
1	Wesly Silalahi - Herlina	Gerindra, Demokrat, NasDem, Gelora	10 Kursi	33,3%
2	Mangatas Marulitua - Ade Sandrawati	Golkar, Perindo, PSI	6 Kursi	20%
3	Susanti Dewayani - Ronald Darwin Tampubolon	PAN, PKS, Hanura	7 Kursi	23,3%
4	Yan Santoso D. Purba - Irwan	PDI-P	7 Kursi	23,3%
		Total Kursi DPRD	30 Kursi	100%

Sumber: Goodkind, Pilkada Walikota Kota Pematangsiantar

Dari tabel tersebut terlihat bahwa koalisi Wesly–Herlina memang bukan koalisi dengan kursi terbesar, tetapi modal politik yang mereka miliki cukup kuat untuk memasuki arena Pilkada secara kompetitif. Dalam Pilkada ukuran koalisi tidak selalu menjadi penentu utama kemenangan, yang lebih penting adalah efektivitas kerja koalisi dalam menggabungkan basis massa, menyusun strategi kampanye, memanfaatkan jaringan politik lokal, serta mobilisasi dukungan secara serentak (Sitorus et al., 2025).

Dalam kenyataannya, Pilkada Kota Pematangsiantar 2024 berlangsung dengan dinamika kompetisi yang cukup ketat, diikuti oleh empat pasangan calon yang masing-masing membawa visi pembangunan, rekam jejak, serta gaya kepemimpinan yang berbeda. Pasangan Wesly Silalahi – Herlina, yang didukung oleh Partai Gerindra, Demokrat, NasDem, dan Gelora, dikenal mengusung pendekatan komunikasi politik yang intensif dan terstruktur, dengan penekanan pada kedekatan langsung dengan masyarakat serta penguatan jaringan koalisi partai. Pasangan Mangatas Marulitua – Ade Sandrawati yang diusung oleh Partai

Golkar, Perindo, dan PSI menonjolkan pengalaman birokrasi dan pendekatan pembangunan berbasis tata kelola pemerintahan yang efektif. Sementara itu, pasangan Susanti Dewayani – Ronald Darwin Tampubolon, dengan dukungan PAN, PKS, dan Hanura, menawarkan kesinambungan program pembangunan serta penguatan sektor pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Adapun pasangan Yan Santoso D. Purba – Irwan yang diusung oleh PDI Perjuangan mengedepankan pendekatan ideologis-partisipatif dengan fokus pada penguatan ekonomi kerakyatan dan keberpihakan terhadap masyarakat.

Dalam persaingan tersebut, pasangan Wesly–Herlina berhasil membangun kedekatan dengan masyarakat melalui strategi yang terarah, program yang relevan, serta konsolidasi koalisi partai yang berjalan efektif (Siahaan, 2024). Koalisi partai pendukung menunjukkan kerja yang solid melalui kegiatan konsolidasi di seluruh kecamatan, pertemuan tatap muka, kampanye dialogis, serta pembagian tugas antarpartai untuk menggerakkan basis pemilih masing-masing. Setiap partai pendukung memiliki karakteristik basis massa yang berbeda, namun seluruhnya mengarah pada satu tujuan yaitu memenangkan pasangan calon (Wardhani, 2019).

Kekuatan koalisi ini dipadukan dengan janji kampanye yang menyentuh kebutuhan nyata masyarakat Kota Pematangsiantar. Program yang dibawa oleh pasangan Wesly–Herlina pada saat kampanye menyampaikan serangkaian janji yang mencerminkan tekad kuat untuk membangun Kota Pematangsiantar menjadi kota yang maju, nyaman, dan berdaya saing. Mereka berjanji akan mewujudkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) agar Pematangsiantar menjadi Kota Pendidikan yang melahirkan generasi cerdas dan berakhlak. Keduanya berkomitmen melakukan revitalisasi Stadion Sangnualuh agar kembali menjadi kebanggaan

masyarakat, menata ulang Pasar Dwikora dan Pasar Horas, serta menghidupkan pasar-pasar ditingkat kecamatan hingga kelurahan supaya ekonomi warga semakin bergeliat. Mereka bertekad mengoptimalkan fungsi Terminal Tanjung Pinggir agar lebih tertata dan memperbaiki kualitas jalan dan penerangan di kawasan pinggiran kota agar pembangunan dirasakan secara merata (Lezen, 2024)

Wesly – Herlina berjanji mengadakan gelaran budaya tahunan sebagai wadah pelestarian identitas kota dan memfasilitasi kegiatan sosial bagi remaja lintas suku dan agama untuk mempererat kebersamaan. Semua janji tersebut lahir dari keinginan tulus untuk menjadikan Kota Pematangsiantar sebagai kota yang hidup, harmonis, dan penuh semangat gotong royong (Lezen, 2024).

Hasil Pilkada 2024 menunjukkan bahwa koalisi partai pendukung bersama strategi kampanye yang terarah memberikan dampak signifikan terhadap kemenangan Wesly–Herlina. Perolehan suara hasil rekapitulasi menunjukkan:

Tabel 1. 3 Perolehan Suara Pilkada Kota Pematangsiantar 2024

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase %
1	Wesly Silalahi – Herlina	49.017 Suara	42.35 %
2	Mangatas Marulitua – Ade Sandrawati	17.137 Suara	14.79 %
3	Susanti Dewayani – Ronald Darwin Tampubolon	43.580 Suara	37.6 %
4	Yan Santoso D. Purba – Irwan	6.083 Suara	5.26 %
Total Suara Sah		115.817 Suara	100 %

Sumber: KPU Kota Pematangsiantar, Desember 2024

Selisih suara antara Wesly–Herlina dan pesaing terdekat menunjukkan keberhasilan strategi koalisi dalam menarik dukungan masyarakat. Kemenangan ini tidak hanya menunjukkan efektivitas kerja koalisi dalam kampanye, tetapi juga kemampuan koalisi dalam memanfaatkan kekuatan jaringan politik yang dimiliki

masing-masing partai pendukung (Sitorus et al., 2025). Mereka berhasil mengungguli pasangan Susanti Dewayani–Ronald Darwin Tampubolon yang memperoleh 43.580 suara. Pasangan Mangatas Marulitua Silalahi–Ade Sandrawati hanya memperoleh 17.137 suara, sementara pasangan Yan Santoso D. Purba–Irwan meraih 6.083 suara.

Proses kemenangan ini sempat diwarnai dinamika politik yang cukup intens terutama dengan adanya sengketa perselisihan hasil Pilkada Pematangsiantar 2024 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh pasangan calon nomor urut 03 Susanti Dewayani – Ronald Darwin Tampubolon. Melalui kuasa hukumnya, pasangan tersebut mengajukan permohonan pembatalan Berita Acara KPU Pematangsiantar Nomor PL.02.6-A/1272/2024 serta Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 630 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hasil perolehan suara. Dalam pokok permohonannya, pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran berupa praktik politik uang yang dituduhkan kepada pasangan nomor urut 01 Wesly Silalahi – Herlina yang disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) serta disertai bukti rekaman/video.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan sela yang dibacakan pada 4 Februari 2025 menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena diajukan melewati batas waktu pengajuan sengketa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tanpa memasuki pokok perkara lebih lanjut Mahkamah Konstitusi menguatkan hasil yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pematangsiantar. Berdasarkan putusan yang bersifat final dan mengikat tersebut kemenangan

pasangan Wesly Silalahi – Herlina dinyatakan sah secara hukum dan menjadi dasar bagi KPU untuk menetapkan pasangan calon terpilih.

Meskipun dinamika Pilkada Pematangsiantar 2024 banyak dibicarakan di ruang publik, namun penjelasan mengenai bagaimana strategi koalisi pendukung Wesly–Herlina merumuskan strategi pemenangan, program kerja kampanye, dan implementasi kegiatan kampanye secara sistematis masih belum tergambar dalam kajian yang ada. Belum terdapat uraian yang menunjukkan bagaimana langkah politik koalisi dibentuk sejak awal, diarahkan, dan dijalankan sampai mampu menghasilkan dukungan suara yang kompetitif bagi pasangan tersebut. Sehingga penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana strategi dan kerja koalisi berkontribusi terhadap kemenangan pasangan Wesly–Herlina pada Pilkada Kota Pematangsiantar 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi koalisi partai politik pendukung dalam memenangkan pasangan Wesly–Herlina pada Pilkada Kota Pematangsiantar Tahun 2024 yang meliputi strategi pemenangan, program kerja kampanye, dan implementasi kegiatan kampanye?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung keberhasilan strategi koalisi partai politik dalam memenangkan pasangan Wesly-Herlina pada Pilkada Kota Pematangsiantar Tahun 2024?

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis mendalam mengenai dinamika kerja koalisi partai politik pendukung pasangan Wesly–Herlina pada Pilkada Kota Pematangsiantar tahun 2024, dengan menitikberatkan pada dua aspek utama.

1. Penelitian ini berfokus pada analisis strategi koalisi partai politik pendukung dalam memenangkan pasangan Wesly–Herlina pada Pilkada Kota Pematangsiantar Tahun 2024, yang meliputi perumusan strategi pemenangan, penyusunan program kerja kampanye, serta implementasi kegiatan kampanye oleh partai-partai koalisi.
2. Penelitian ini difokuskan pada identifikasi faktor-faktor pendukung keberhasilan strategi koalisi baik yang berasal dari internal koalisi seperti soliditas partai, efektivitas pembagian tugas, maupun faktor eksternal seperti kekuatan figur kandidat, dukungan masyarakat, dan jaringan basis massa politik.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis strategi koalisi partai politik pendukung dalam memenangkan pasangan Wesly–Herlina pada Pilkada Kota Pematangsiantar Tahun 2024, yang mencakup perumusan strategi pemenangan, penyusunan program kerja kampanye, serta implementasi kegiatan kampanye oleh partai-partai koalisi.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung keberhasilan strategi koalisi partai politik dalam memenangkan pasangan Wesley–Herlina pada Pilkada Kota Pematangsiantar Tahun 2024.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang bermakna baik secara teoritis maupun praktis dalam memahami dinamika politik lokal khususnya terkait pembentukan dan pengelolaan koalisi partai dalam kontestasi Pilkada. Dengan mengkaji strategi pemenangan dan pola kerja sama antarpolisi penelitian ini berupaya menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap proses politik yang terjadi di tingkat daerah.

Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi rujukan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses demokrasi baik sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan maupun sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan strategi politik yang lebih efektif dan efisien.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berupaya memperkaya kajian dalam bidang ilmu politik, khususnya yang berkaitan dengan koalisi partai dan strategi elektoral.

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu politik, khususnya dalam kajian mengenai koalisi partai politik, strategi pemenangan elektoral, dan kampanye politik lokal.
2. Temuan penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai bagaimana koalisi partai dibangun, dikelola, dan dioptimalkan dalam menghadapi kontestasi Pilkada.

3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi ilmiah tentang hubungan antara soliditas koalisi, distribusi peran antarpantai, dan keberhasilan elektoral.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses politik lokal.

1. Bagi partai politik dan tim pemenang penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan strategis bagi partai politik dalam membangun koalisi yang efektif, meningkatkan koordinasi internal, serta merancang strategi kampanye yang lebih terarah dan efisien pada pemilihan berikutnya.
2. Bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran empiris mengenai praktik kerja koalisi partai di lapangan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi, peningkatan fasilitasi kampanye, maupun pengawasan terhadap proses Pilkada.
3. Bagi Masyarakat dan Pemilih, penelitian ini membantu masyarakat melihat bagaimana proses koalisi politik bekerja dalam menentukan arah dukungan terhadap pasangan calon sehingga dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat dalam menilai strategi dan kualitas demokrasi lokal.